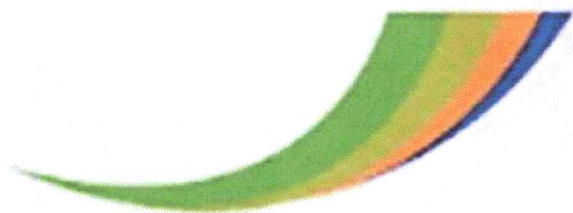


RENCANA AKSI



2022

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

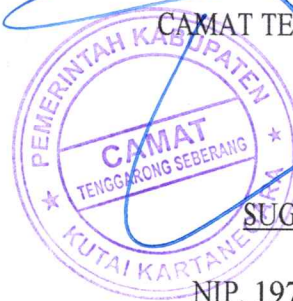
Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun rencana aksi kinerja sasaran Perangkat Daerah. Rencana aksi atau action plan adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Rencana aksi itu sendiri setidaknya harus memenuhi 5 kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound).

Begitu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah terutama menghadirkan kembali negara dalam sendi kehidupan masyarakat merupakan tantangan bagi segenap Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan kerja nyata. Untuk menjawab tantangan dimaksud diperlukan perencanaan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dituntut untuk mampu merencanakan kebijakan yang inovatif dan dapat diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi untuk selanjutnya dilakukan monitoring sehingga ada evaluasi untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik .

Dokumen rencana aksi ini hendaknya menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain daripada itu harapannya dokumen rencana aksi ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi ketika mewujudkan dan memformulasikan perencanaan di Kabupaten Paser.

Tenggarong Seberang, Februari 2022

CAMAT TENGGARONG SEBERANG



SUGIARTO,SH.,M.Si

Pembina

NIP. 19720112 200604 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	2
BAB II VISI dan MISI	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran	6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III RENCANA AKSI	17
3.1 Rencana Aksi	17
3.2 Sasaran Strategis	18
3.3 Penganggaran	19
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran. Membuat action plan atau rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Rencana aksi sendiri setidaknya harus memenuhi 5 kriteria SMART. Yakni Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound.

Mengapa perlu memenuhi 5 kriteria di atas? Tentunya karena rencana perubahan yang kita buat akan sia-sia tanpa adanya kelima hal tersebut. Bayangkan jika kita harus membuat perubahan atas masalah yang tidak jelas atau tidak spesifik, membuat perubahan atas rencana-rencana tanpa ada tolok ukur keberhasilan yang pasti, membuat perubahan yang sudah nyata-nyata tidak mungkin diubah, membuat perubahan yang imajiner tanpa dilandasi realita sekitar, membuat perubahan tanpa ada batasan waktu atas goal yang ingin kita capai. Jadi kesimpulannya, kelima kriteria di atas akan membantu mengarahkan kita membuat perubahan sosial melalui rencana aksi yang matang sehingga menjadi jelas target apa yang ingin dicapai.

Rencana Aksi sangat penting dibuat di awal karena dari situlah kita dapat menganalisa berbagai hal atau tujuan utama yang menjawab problem statement, objektif, aktivitas, hingga eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait perubahan yang akan kita lakukan.

Dari Rencana Aksi pula, kita akan memiliki arah yang jelas atas awal dan akhir perubahan tersebut. Rencana Aksi juga bisa merepresentasikan proses perubahan

yang dinamis, jika diperlukan kita juga dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dokumen Rencana Aksi berperan penting untuk mengeksekusi sasaran kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang sehingga dapat MEWUJUDKAN MASYRAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Kecamatan Tenggarong Seberang, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan rencana aksi yang telah diformulasikan dengan memperhatikan unsur Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound.
2. Untuk mensinkronisasikan rencana aksi dengan implementasi kebijakan.
3. Sebagai data dukung untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian diwilayah Kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah Kecamatan.

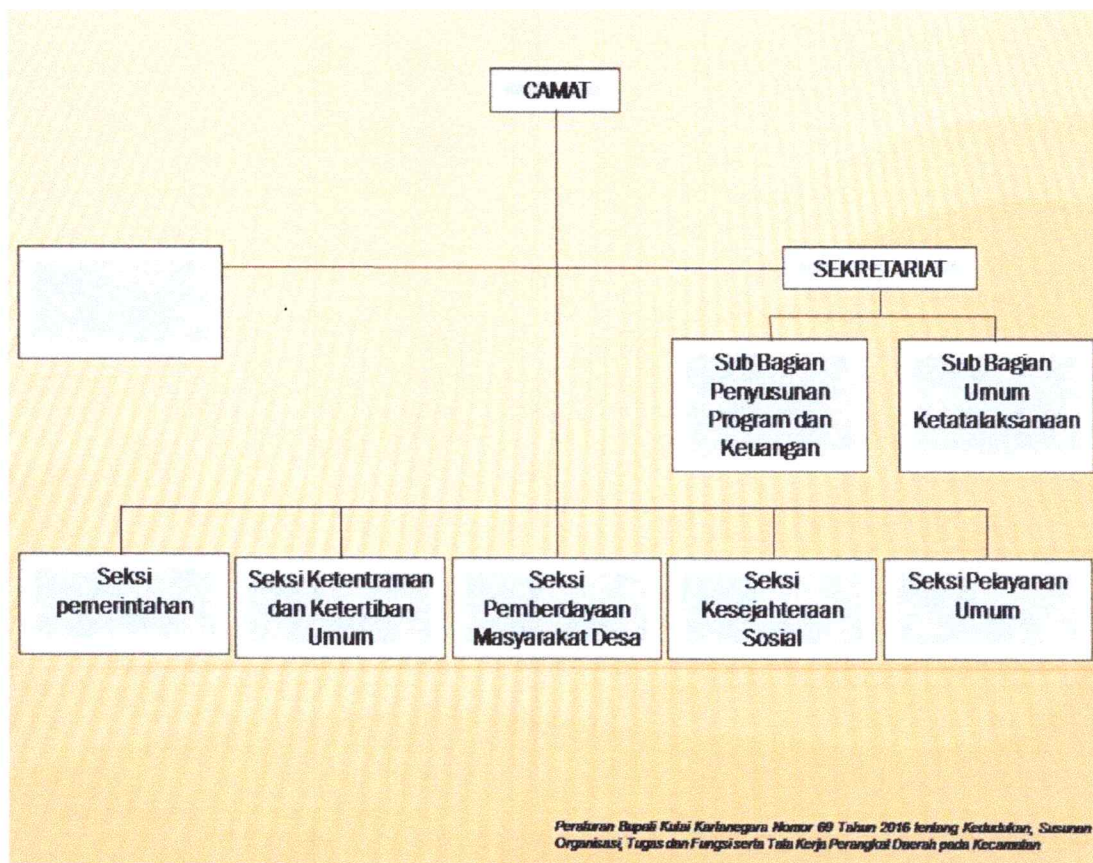
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan / atau kelurahan dan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, fasilitas dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum

Tabel 1
Bagan struktur organisasi



Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Per Desember 2021 adalah sebanyak 63 orang.

Kualifikasi Pendidikan

- SD	:	1 orang
- SLTP	:	0 orang
- SLTA	:	38 orang
- D1	:	-
- D2	:	-
- D3	:	2 orang
- S1	:	17 orang
- S2	:	5 orang
- S3	:	<u>-</u>
Jumlah	:	63 orang

Pangkat Dan Golongan

- Golongan I	:	- orang
- Golongan II	:	35 orang
- Golongan III	:	25 orang
- Golongan IV	:	<u>3 orang</u>
Jumlah	:	63 orang

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat Struktural	:	9 orang
Pejabat Fungsional	:	54 orang

BAB II

VISI DAN MISI

2.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang, serta guna mendukung agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai kartanegara maka Visi yang hendak dicapai dalam Renstra Perubahan periode 2016–2021 adalah :

TERWUJUDNYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG YANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERKEADILAN,,

Guna mewujudkan visi Kecamatan Tenggarong Seberang 2016-2021 diatas, maka dirumuskanlah Misi Kecamatan Tenggarong Seberang dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah yaitu :

1. MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT
2. MENINGKATNYA KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

2.2 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan OPD.

Rumusan Tujuan Rencana Aksi Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi SKPD
2. Hasil Perumusan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk Selanjutnya Dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 Adalah Sebagai Berikut :

Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkantoran Dan Pengeloaan Data Secara Profesional Dan Berbasis Tekhnologi Informasi;

Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD Dalam Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Sesuai Kewenangan Dan Tupoksi Kecamatan;

Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Secara Komprehensif (Lengkap) Dan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan;

Meningkatkan Semangat Gotong Royong, Swadaya, Prakarsa Dan Inisiasi Masyarakat Dalam Berpartisipasi Membangun Desa Dan Kecamatan ;

Optimalisasi Fungsi Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase/Gorong-Gorong Di Wilayah Kecamatan Dan Desa;

Pembangunan Secara Menyeluruh Menyangkut Konektivitas Antar Wilayah Kecamatan ;

Penanganan STUNTING Secara Maksimal ;

Menciftakan Kampung Tangguh COVID 19 (Penanganan COVID 19 secara maksimal dan berkelanjutan).

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Renstra 2021 - 2026
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95	95	98	100	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	9	9	9
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK.A-SK.PD	Jumlah Dokumen RK.A-SK.PD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK.A-SK.PD	Jumlah Dokumen Perubahan RK.A-SK.PD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SK.PD	Jumlah Dokumen DPA-SK.PD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SK.PD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SK.PD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SK.PD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SK.PD	2	2	2	2	2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	85	85	86	100	100
			Tersedianya gaji dan tunjangan	100	100	100	100	100
			Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemerkasaan	95	100	100	100	100

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12	12
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4	4	4	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK.PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SK.PD	1	1	1	1	1	1
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3	3	3	3	3	3
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SK.PD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SK.PD	4	4	4	4	4	4
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	2	2	2	2
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SK.PD	1	1	1	1	1	1
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	1	1	1	1	1
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1	1	1	1	1	1
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	75	85	85	95	95	100
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	75	85	95	95	95	100
			Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	55	60	65	70	75	75
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	74	74	74	74	74	74
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	74	74	74	74	74	74

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	1	1
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	4	4	4	4	4
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3	3	3	3	3
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	98	98	98	98	98
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	10	10	10	10	10
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	60	60	60	60	60
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	43	43	43	43	43	43
			Jumlah Makanan dan Minuman	960	960	960	960	960	960
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	175388	175388	175388	175388	175388	175388
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Adverorial yang disediakan	360	360	360	360	360	360
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	12	12	12	12	12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	95	95	95	95	95	95
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	80	80	80	80	80	80

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	1	1	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	463	463	463	463	463	463
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	12	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	12	12	12	12	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	10	10	10	10	10	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10	10	10	10	10	10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	1	1
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	25	25	25	25	25	25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	1	1

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	1	1
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	65	67	67	67	67	67
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	1	1	1	1	1
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	95	100	100	100	100	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	9	9	9	9	9	9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	100	100	100
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	18	18	18	18	18	18
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85	85	85	85	85	85

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			85		85		85		85
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90	90	90	90	90	90	100	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	
		Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	18	18	18	18	18	18	18	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	9	9	9	9	9	9	9	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertelaksananya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kantor camat	27	27	27	27	27	27	27	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan	18	18	18	18	18	18	18	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Tenggarong Seberang 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021. Perjanjian Kinerja untuk selanjutnya dirumuskan sasaran renstra Kecamatan Tenggarong Seberang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan;
2. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	4	5
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	80
		Tersedianya gaji dan tunjangan	100
		Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	95
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	70
		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	70
		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	65
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	95
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Desa Dalam kategori Baik	88
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	100
		Persentase capaian ketenteraman dan ketertiban Umum	100

BAB III RENCANA AKSI

3.1 Rencana Aksi

Untuk mendukung perencanaan kinerja sebagaimana dalam perjanjian kinerja 2022 tersebut diatas, direncanakan aksi sebagai berikut :

Tabel 4
Rencana Aksi 2022

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik	1. Meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan
	2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
	3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	3. Meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	4. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
	5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	5. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
	6. Menunjang urusan pemerintahan daerah	

3.2 Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan

Tabel 5
Sasaran Strategis 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	
		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100%
2	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %

3.3 Penganggaran

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

NO						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022					%
							INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	REALISASI	
7						UNSUR KEWILAYAHAN						
7	0					KECAMATAN				37.210.402.065	35.520.877.429	95,46%
7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			9.096.836.943	7.573.031.403	83,25%
7	0	0	2.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95.322.000	76.334.400	80,08%
7	0	0	2.	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	30.030.000	15.501.600	51,62%
7	0	0	2.	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	18.390.000	17.755.000	96,55%
7	0	0	2.	0		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	18.390.000	15.440.000	83,96%
7	0	0	2.	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	20.047.000	19.283.000	96,19%
7	0	0	2.	0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	6 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	8.465.000	8.354.800	98,70%
7	0	0	2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.224.556.683	5.850.438.109	80,98%
7	0	0	2.	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	12 bulan	Kecamatan Tenggarong Seberang	6.931.703.183	5.667.538.749	81,76%
7	0	0	2.	0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 laporan	Kecamatan Tenggarong Seberang	3.600.000	3.600.000	100,00%
7	0	0	2.	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kecamatan Tenggarong Seberang	5.952.000	3.906.800	65,64%
7	0	0	2.	0		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 kali	Kecamatan Tenggarong Seberang	5.000.000		0,00%

7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulana SKPD	4 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	29.682.000	28.470.000	95,92%
7	0	0	2.	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 laporan	Kecamatan Tenggarong Seberang	6.653.000	3.691.560	55,49%
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	1 laporan	Kecamatan Tenggarong Seberang	241.966.500	143.231.000	59,19%
7	0	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.000.000	3.631.450	45,39%
7	0	0	2.	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	4.000.000	2.802.000	70,05%
7	0	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	4.000.000	829.450	20,74%
7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				47.000.000	24.229.616	51,55%
7	0	0	2.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	74 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	4.000.000	3.299.700	82,49%
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1 unit	Kecamatan Tenggarong Seberang	4.000.000	3.980.000	99,50%
7	0	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	Kecamatan Tenggarong Seberang	4.000.000	3.980.000	99,50%
7	0	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	Kecamatan Tenggarong Seberang	35.000.000	12.969.916	37,06%
7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah				669.558.260	639.722.281	95,54%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen yang tersedia	9 layanan	Kecamatan Tenggarong Seberang	29.413.760	29.411.400	99,99%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 jenis	Kecamatan Tenggarong Seberang	42.500.000	42.488.001	99,97%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	9 layanan	Kecamatan Tenggarong Seberang	100.000.000	97.626.850	97,63%

7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 layanan	Kecamatan Tenggarong Seberang	70.155.000	70.154.800	100,00%
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 orang	Kecamatan Tenggarong Seberang	50.000.000	49.202.000	98,40%
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan	55 orang	Kecamatan Tenggarong Seberang	307.087.500	306.952.130	99,96%
7	0	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan	1 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	48.990.000	37.427.400	76,40%
7	0	0	2.	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 aplikasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	21.412.000	6.459.700	30,17%
7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.300.000	168.982.800	95,31%
7	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit	1 unit	Kecamatan Tenggarong Seberang	177.300.000	168.982.800	95,31%
7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.100.000	384.519.091	87,37%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	12 bulan	Kecamatan Tenggarong Seberang	5.100.000	5.067.000	99,35%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang tersedia	12 bulan	Kecamatan Tenggarong Seberang	65.000.000	38.467.707	59,18%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Kecamatan Tenggarong Seberang	20.000.000	19.750.000	98,75%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan	12 bulan	Kecamatan Tenggarong Seberang	350.000.000	321.234.384	91,78%
7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				435.000.000	425.173.656	97,74%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa yang tersedia	1 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	10.000.000	9.934.000	99,34%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa yang tersedia	1 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	125.000.000	119.517.156	95,61%

7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	1 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	25.000.000	24.515.000	98,06%
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 unit	Kecamatan Tenggarong Seberang	25.000.000	24.747.500	98,99%
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara	1 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	150.000.000	148.605.000	99,07%
7	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara	1 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	100.000.000	97.855.000	97,86%
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				27.655.235.000	27.496.682.026	91,09%
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				55.105.000	50.196.500	91,09%
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 fasilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	55.105.000	50.196.500	91,09%
7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				27.600.130.000	27.446.485.526	99,44%
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	Kecamatan Tenggarong Seberang	30.000.000	26.838.800	89,46%
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	3 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	27.570.130.000	27.419.646.726	99,45%
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				201.486.000	197.135.800	97,84%
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				201.486.000	197.135.800	97,84%
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100 Jumlah kehadiran lembaga desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	28.990.000	28.328.000	97,72%
7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100 Jumlah kehadiran lembaga desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	172.496.000	168.807.800	97,86%

7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				256.844.122	254.028.200	98,90%
7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				256.844.122	254.028.200	98,90%
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	18 desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	25.000.000	22.583.200	90,33%
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	Kecamatan Tenggarong Seberang	15.000.000	14.900.000	99,33%
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	9 kali	Kecamatan Tenggarong Seberang	15.000.000	14.833.000	98,89%
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kantor camat	27 orang	Kecamatan Tenggarong Seberang	186.000.000	186.000.000	100,00%
7	0	0	2.	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan	18 Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	15.844.122	15.712.000	99,17%
TOTAL									37.210.402.065	35.520.877.429	95,46%

BAB IV PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2022, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas pekerjaan Umum tahun 2022 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.